

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Singkatan	xii
Daftar Lampiran	xiii
Intisari	xiv
Abstract	xv
BAB I PENGANTAR	1
1.1 Latar Belakang dan Sejarah Pembangunan Pulau Batam	1
1.2 Rumusan Permasalahan	27
1.3 Tujuan Penelitian	31
1.4 Manfaat Penelitian	31
1.5 Keaslian Penelitian dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya.....	32
BAB II LANDASAN TEORI	40
2.1 Konsep dan Praktek Pengembangan Kawasan Khusus Ekonomi dan Strategis.....	40
2.1.1 Konsep Kawasan Ekonomi Khusus	40
2.1.2 Alasan Pembentukan Kawasan Khusus Ekonomi	43
2.1.3 Sejarah Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	47
2.1.4 Praktek Kawasan Ekonomi Khusus di Negara Lain	51
2.1.5 Pengembangan Kawasan Strategis di Indonesia	54
2.2 Konsep dan Praktek Kebijakan Desentralisasi Asimetris	59
2.2.1 Konsepsi tentang Desentralisasi Asimetris	59
2.2.2 Motif dan Praktek Desentralisasi Asimetris di Beberapa Negara	63
2.2.2.1 Motivasi Politik	64
2.2.2.2 Motivasi Ekonomi	70
2.2.3 Praktek Desentralisasi Asimetris di Indonesia	75
2.2.3.1 Motivasi Diberlakukannya Desentralisasi Asimetris di Indonesia	75
2.2.3.2 Implementasi Desentralisasi Asimetris di Indonesia	76
2.3 Perbandingan antara Konsep Kawasan Khusus dan Desentralisasi	83
2.4 Kajian dan Penelitian Sebelumnya	86
2.4.1 Penelitian Sebelumnya tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis	86
2.4.2 Penelitian Sebelumnya tentang Implementasi Desentralisasi Asimetris	88
2.5 Kerangka Teori	92
BAB III METODE PENELITIAN.....	94
3.1 Metode Penelitian yang Digunakan	94
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	95
3.3 Metode Pengumpulan Data	95



3.3.1	Sumber Data	96
3.3.2	Teknik Pengumpulan Data	97
3.4	Metode Analisis yang Digunakan	107
3.5	Keterbatasan Penelitian	108
BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMUNDURAN EKONOMI KOTA BATAM ...		109
4.1	Hasil Penelitian Lapangan	109
4.1.1	Pandangan Pakar terhadap Faktor Penyebab Kemunduran Kota Batam	109
4.1.2	Pandangan Pelaku Usaha terhadap Penyebab Kemunduran Kota Batam	110
4.1.3	Pandangan Masyarakat Batam Faktor Penyebab Kemunduran Kota Batam	111
4.2	Analisis Hasil Penelitian	113
4.3	Analisis Kewenangan yang Tumpang Tindih antara Pemerintah dan Otorita Batam ...	120
4.3.1	Tumpang Tindih Kewenangan dalam Hak Pengelolaan Lahan di Batam	123
4.3.2	Tumpang Tindih dalam Hal Perizinan di Batam	127
4.3.3	Benturan Kewenangan Pengelolaan Kepelabuhanan	129
4.3.4	Benturan Kewenangan Pengelolaan Kebandarudaraan	133
4.3.5	Benturan Kewenangan Pengelolaan Fungsi Kawasan Pariwisata	135
4.4	Permasalahan Lainnya yang Muncul Setelah Penerapan Otonomi Daerah	136
4.4.1	Perlambatan Ekonomi di Batam	137
4.4.2	Lemahnya Sinergi Antar Institusi	140
4.4.3	Ketidakpastian Hukum	141
4.4.4	Menurunnya Daya Saing Batam	142
4.5	Dampak Negatif Akibat Adanya Dualisme Kewenangan di Batam	144
4.6	Masalah Sosial dan Perlunya Pengembangan Pembangunan Berkelanjutan di Batam ..	147
BAB V MENGIDENTIFIKASI PILIHAN KEBIJAKAN DI KOTA BATAM DENGAN TEKNIK ANALISIS DELPHI		151
5.1	Hasil Penelitian Lapangan	151
5.2	Analisis Hasil Penelitian	154
5.3	Analisis dan Implementasi Kebijakan Free Trade Zone (FTZ) di Batam	158
5.3.1	Kilas Balik Status Batam Menuju FTZ	158
5.3.2	Dasar Hukum dan Kelembagaan FTZ Batam	161
5.3.3	Implementasi FTZ Batam	164
5.3.4	Prospek FTZ Batam	170
5.4	Transformasi FTZ ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam	172
5.5	Gagasan Penerapan Otonomi Khusus di Batam	178
BAB VI MEMLIH KEBIJAKAN TERBAIK DI BATAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALITYCAL HIERARCHY PROCESS (AHP)		188
6.1	Penggunaan Metode <i>Analitycal Hierarchy Process</i> (AHP)	188
6.2	Hasil Penelitian dengan Metode AHP	191
6.2.1	Perhitungan AHP untuk Kriteria	191
6.2.2	Perhitungan AHP untuk Alternatif Kebijakan	193
6.2.3	Menentukan Pilihan Kebijakan Terbaik di Batam	201
6.3	Analisis Hasil Penelitian	203



**ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA BATAM SEBAGAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
DAN STRATEGIS DI INDONESIA**

MUHAMMAD ZAENUDDIN, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

6.4	Substansi Kekhususan yang Diberikan dalam Konsep Otonomi Khusus Batam	207
6.5	Pentingnya Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batam	213
6.6	Beberapa Alternatif Kebijakan Otonomi Khusus di Batam	214
BAB VII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	220
7.1	Kesimpulan	220
7.2	Rekomendasi	223
DAFTAR PUSTAKA	225